

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2008-2017**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh**

**SARINA**  
**90300115135**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALALUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

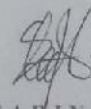
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sarina  
NIM : 90300115135  
Tempat/Tgl. Lahir : Anrelli, 28 April 1997  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Poros Kulo, Kulo  
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal demi hukum.

Gowa, 28 Agustus 2019

Penyusun,



**SARINA**  
NIM 90300115135



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017**" yang disusun oleh **Sarina NIM -90300115135**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi.

Samata-Gowa, 19 Agustus 2019  
18 Dzulhijjah 1440 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	
Penguji 1	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.	
Penguji 2	: Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak.CA.	
Pembimbing 1	: Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing 2	: Wardihan Sabar, S.Pd., M.Si.	

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilvas, M.Ag  
NIP.19661130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, karena rahmat, keinginan dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad swa yang telah membawa umatnya dari alam yang berliku-liku menuju jalan yang lurus yang aman dan sejahtera minadzulumati ilannur. Dengan izin dan kehendak Allah swt skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul ***“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017”*** telah diselesaikan dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu: Ayahanda **Rasidi** dan Ibunda **Hasnawati** paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai, telah mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya sampai pada tingkat ini dan terus memberikan doanya. Karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa

terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor serta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Siradjuddin, SE., M.Si dan Hasbiullah SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas segala bantuan, kontribusi dan bimbingannya.
4. Bapak Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Wardihan Sabar, SE., M.Si. pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji skripsi Dr.Hj.Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Saiful Muchlis, SE.,M.SA.Ak.CA yang mengajarkan kepada penyusun arti sebuah kesabaran, dan pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja.
6. Penguji Komprehensif yang telah mengajarkan saya arti kesabaran dan teladan, serta pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja Dr. Awaluddin, SE., M.Si., Drs. Thamrin Logawali, MH. dan Dr. Hasbiullah,SE.,M.Si.

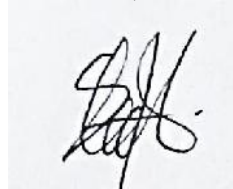
7. Seluruh staf bagian Akademik, tata usaha, jurusan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi.
8. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas kepada penyusun selama proses perkuliahan, dan praktikum.
9. Teman-teman seangkatan 2015, terkhusus untuk jurusan Ilmu Ekonomi semoga tetap menjadi keluarga yang solid meskipun nantinya kita berpisah untuk mencapai kesuksesan masing-masing.
10. Teman seperjuangan menunggu di depan ruangan jurusan Besse, Rial, Anjas, Silvi, Dwi, Ammar, Arya, Nunu, Irma, Umrah dan teman-teman yang lainnya tetap semangat.
11. Teman-teman KKN angk-60 Posko 6 Desa Padaelo yang selalu memberi dukungan.
12. Terima kasih juga untuk Miftahul Kausar, ST yang sudah menemani saya berjuang dan menyemangati saya hingga skripsi ini selesai dan saya sampai pada tujuan saya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan,

sehingga penyusun tak lupa mengharapkan saran dan kritik terhadap skripsi ini.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Gowa,      Agustus 2019  
Penulis,



**SARINA**  
NIM: 90300115150



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-13</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14-30</b>
A. Grand Teori .....	14
B. Tinjauan Variabel .....	18
C. Keterkaitan Antar Variabel .....	24
D. Peneliti Terdahulu .....	26
E. Kerangka Berpikir.....	28
F. Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30-42</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Jenis dan Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Definisi Operasional Peneltian .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43-62</b>
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	43
B. Hasil Penelitian .....	49



C. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63-64</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65-66</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Pulau Sulawesi Tahun 2013-2017 .....	3
1.2	Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	5
1.3	IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 .....	7
1.4	Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tahun 2013-2015 .....	11
3.1	Tabel Autokolerasi .....	36
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 .....	44
4.2	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 .....	46
4.3	Hasil Pengolahan Chow Test.....	49
4.4	Hasil Uji Hausman Test .....	50
4.5	Uji Multikolinieritas.....	52
4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	52
4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.8	Hasil Estimasi Data Panel dengan Fixed Effect Model.....	54
4.9	Hasil Koefisien Determinasi.....	55
4.10	Hasil Uji F Estimasi Fixed Effect.....	57
4.11	Hasil Uji T.....	58

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
2.1	Kurva Lorenz.....	17
2.2	Kerangka Pikir Penelitian .....	29
4.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi ..... Tahun 2017	47
4.2	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.....	48
4.3	Uji Normalitas.....	51



## ABSTRAK

**N a m a** : SARINA  
**N I M** : 903001151350  
**Judul Skripsi** : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini menggunakan data sekunder jenis data panel (*Time Seriess* dan *Cross Section*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik. Teknik pengolahan data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan bantuan *software Eviews 10 Student Version*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel IPM dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan

**Kata Kunci** : Ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, PDRB dan Kemiskinan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Pada umumnya setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di negara tersebut. Selama beberapa kurun waktu terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung stabil di kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir dan memiliki tren meningkat meskipun tipis.<sup>1</sup> Namun di negara berkembang seperti Indonesia sering terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tidak merata dan menyeluruh ke semua daerah sehingga menyebabkan adanya daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan perekonomian jika dibandingkan dengan daerah yang lainnya.

Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan unsur dan bagian yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi tidak diikuti dengan pemerataan justru akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial sehingga dapat mendorong timbulnya keresahan dan ketegangan politik.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

<sup>2</sup> Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah..* (Jakarta : Rajawali Pers), h.71

perbaikan sistem kelembagaan, sistem kelembagaan yang dimaksud adalah perbaikan sistem seperti ekonomi, hukum, sosial dan budaya.<sup>3</sup>

Indikator kemakmuran daerah yang dapat digunakan untuk memperlihatkan kemajuan dalam peningkatan kemakmuran masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, adalah dengan melihat pada perkembangan PDRB dengan harga berlaku yang sudah dapat dihasilkan dalam periode perencanaan. Alasannya adalah karena nilai PDRB tersebut merupakan hasil produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah dalam periode tertentu. Kedua, nilai pendapatan perkapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk di tahun yang sama. Nilai PDRB perkapita ini merupakan indikator kemakmuran daerah yang lebih baik dan dapat dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Ketiga, mengingat kemakmuran tersebut bukan hanya bersifat materi saja, maka indikator yang lebih baik dan bersifat konferehensif adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Angka IPM pada dasarnya adalah gabungan dari tiga unsur kemakmuran yaitu pendapatan (daya beli masyarakat), pendidikan dan kesehatan.<sup>4</sup>

Secara umum PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan merupakan provinsi dengan PDRB terbesar yang ada di pulau Sulawesi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1:

---

<sup>3</sup>Lincoln Arsyad. *Pembangunan Ekonomi, Edisi 5*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2010)

<sup>4</sup>Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*,.(Jakarta: Rajawali Pers.2015), h.73

**Tabel 1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Provinsi di Pulau Sulawesi**  
**Tahun 2013-2017 (Miliar Rupiah)**

PROVIN SI	TAHUN					Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Sulawesi Utara	58.677,59	62.442,50	66.359,42	70.418,81	74.771,07	6,25%
Sulawesi Tengah	62.259,53	68.219,32	71.676,11	82.829,23	91.070,55	10,04%
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>202.184,59</b>	<b>217.589,13</b>	<b>233.998,74</b>	<b>250.729,56</b>	<b>269.338,55</b>	<b>7,43%</b>
Sulawesi Tenggara	59.785,40	64.268,71	68.290,56	72.988,30	77.739,55	6,79%
Gorontalo	17.987,07	19.367,57	20.775,70	22.070,45	23.507,15	6,92%
Sulawesi Barat	20.786,89	22.227,39	24.200,11	25.983,38	27.550,26	7,30%

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel di atas dapat diperhatikan bahwa provinsi dengan pertumbuhan PDRB terbesar adalah provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan PDRB sebesar 10,04%. Provinsi dengan pertumbuhan terbesar kedua ialah provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 7,43% berada diatas provinsi Sulawesi Barat dengan pertumbuhan PDRB sebesar 7,30%. Pertumbuhan PDRB terbesar keempat yaitu sebesar 6,92%. Di susul oleh provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 6,79%. Sedangkan provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan pertumbuhan PDRB terkecil selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 6,25%.

Kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi sebuah realita yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, berbagai kebijakan pun telah diambil dan

diterapkan pemerintah guna mengurangi kesenjangan ini namun adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab gejala ini tidak dapat dihindari.

Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan. Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan.<sup>5</sup>

Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan memberikan kemakmuran bagi setiap masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Distribusi pendapatan yang timpang hanya memberikan kemakmuran bagi segelintir kelompok tertentu. Sebaliknya distribusi pendapatan yang merata akan memberikan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*.(Jakarta: Ghalia Indonesia.2001)



Ketimpangan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas, sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.<sup>6</sup>

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui indeks gini ratio. Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapapun yaitu antara 0 (kemeraan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien gini negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang di antara 0.50 dan 0.70.<sup>7</sup>

Secara umum, gini ratio provinsi Sulawesi setiap tahunnya mengalami penurunan, yang berarti kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang ada semakin menurun meskipun penurunannya terbilang masih sangat rendah. Hal ini dapat diperhatikan dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Indeks Gini
2013	0.429
2014	0.425
2015	0.424
2016	0.426
2017	0.407

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019*

---

<sup>5</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, (Jakarta: Erlangga.2011)

<sup>7</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, (Jakarta: Erlangga.2011), h.257

Berdasarkan Tabel 1.2 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi meskipun merupakan provinsi dengan PDRB terbesar di pulau Sulawesi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Di mana pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 koefisien ginya cenderung menurun dari 0.429 menjadi 0.425 dan turun lagi menjadi 0.424 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 koefisien ginya mengalami peningkatan sebesar 0.002 sehingga menjadi 0.426 dan pada tahun terakhir kembali mengalami penurunan sebesar 0.019 sehingga koefisien gini Sulawesi Selatan menjadi 0.407.

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan meskipun tiap tahunnya mengalami penurunan namun masih dikategorikan tinggi dan berada di atas angka nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik gini ratio pada tahun 2017 sebesar 0.407, sedangkan gini ratio nasional sebesar 0.391 dan menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan terbesar ke dua setelah DI Yogyakarta dengan gini ratio 0.440.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan penduduk miskin adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ketimpangan distribusi pendapatan tinggi maka akan ada indikasi bahwa di daerah tersebut ada masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi sebagaimana adanya. Artinya hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan Kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan di Indonesia selama tahun 1976-2008. Pada tahun 1976 kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 19,6% dari pendapatan. Pada tahun 2008, kelompok tersebut hanya menikmati 19.5% dari pendapatan. Dengan kata lain “kue pendapatan”

yang dinikmati 40% kelompok berpenghasilan rendah di Indonesia menurun selama 1976-2008. Kendati ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia relatif lebih rendah menurut standar Bank Dunia, ternyata prosi terbesar kue nasional tetap dinikmati oleh 20% penduduk berpendapatan tertinggi dan 40% berpendapatan menengah. Pada tahun 1976 kelompok 20% berpendapatan tertinggi telah menerima 42.5% dari pendapatan dan pada tahun 2008 mereka menikmati 44.8% dari pendapatan. Pada tahun 1976 kelompok 40% berpendapatan menengah menikmati 38% dari pendapatan dan tahun 2008 mereka menikmati 35,7%.<sup>8</sup>

Untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusianya. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan, begitu sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

**Tabel 1.3**  
**IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kep. Selayar	64.32	64,95	65,39
Bulukumba	65,58	66,46	67,08
Bantaeng	66,2	66,59	67,27
Jeneponto	61,61	61,81	62,67

<sup>8</sup>Mudrajad Kuncoro. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN.2010), h.85-86

Kabupaten/kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2015	2016	2017
Takalar	64,07	64,96	65,48
Gowa	66,87	66,7	68,33
Sinjai	64,48	65,36	65,8
Maros	67,13	67,76	68,42
Pangkep	66,65	66,68	67,25
Barru	68,64	69,07	69,56
Bone	63,11	63,86	64,16
Soppeng	65,33	65,95	66,67
Wajo	66,9	67,52	68,18
Sidrap	69	69,39	70
Pinrang	69,24	69,42	69,84
Enrekang	70,03	70,79	71,44
Luwu	68,11	68,71	69,02
Tana Toraja	65,75	66,25	66,82
Luwu Utara	67,44	67,81	68,35
Luwu Timur	70,43	70,95	71,46
Toraja Utara	66,76	67,49	67,9
Makassar	79,94	80,53	81,13
Pare-Pare	76,31	76,48	76,68
Palopo	76,27	76,45	76,71

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019*

Tabel di atas menunjukkan nilai IPM yang ada di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya meskipun tipis. Kendati demikian nilai IPM beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan ini masih berada dibawah nilai IPM secara nasional. Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki IPM terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Secara umum, peningkatan IPM di Sulawesi Selatan merupakan cerminan dari angka harapan hidup bayi yang baru lahir yang memiliki peluang untuk hidup

hingga 69,84 tahun yang meningkat sebesar 0,02 dalam kurun waktu setahun dimana Kabupaten Tanah Toraja memiliki peluang hidup tertinggi sebesar 72,94 tahun dan Kabupaten Jeneponto memiliki peluang hidup terendah yaitu sebesar 65,65 tahun, angka melek huruf sebesar 91,65 naik sebesar 0,13 poin dari tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah dari 9,74 naik menjadi 10,53 dalam setahun, dan pengeluaran perkapita masyarakat yang telah mencapai Rp10,49 juta, meningkat Rp208.000 dari tahun sebelumnya yang diukur dengan acuan harga konstan 2012.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai distribusi pendapatan itu sendiri yaitu pada QS. Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah , untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja dan di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>10</sup>*

Menurut Quraish Shihab ayat ke tujuh surah Al-Hasyr ini mengandung pengertian bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

<sup>10</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya, Edisi tajwid*, (PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014)

kekuasaan sekelompok manusia saja, tetapi harus beredar sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalang ayat tujuh ini bukan hanya membatalkan tradisi masyarakat jahiliyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta lalu membagi selebihnya sesuka hati. Bukan hanya membatalkan itu saja, tetapi ayat tujuh telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat. Walaupun tidak berarti, menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalang ayat tujuh ini, Islam menolak segala bentuk monopoli karena sejak semula Al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>11</sup>

Secara umum tingkat kemiskinan beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tiap tahunnya meskipun ada beberapa daerah yang mengalami fluktuasi. Pare-pare merupakan kota dengan jumlah penduduk miskin terendah yang berada di provinsi Selatan dengan penduduk miskin sekitar 8000 jiwa selama periode 2013-2015 sedangkan kabupaten Bone merupakan daerah dengan penduduk miskin terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sekitar 80.000 jiwa pada tahun 2013 dan 2014. Meskipun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5000 jiwa sehingga penduduk miskin yang berada di kabupaten Bone pada tahun 2015 menjadi 75.000 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

---

<sup>11</sup>Muh, Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an* vol 14. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.113

<b>2013 – 2015 (ribuan jiwa)</b>			
<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kep.Selayar	18,2	16,95	16,9
Bulukumba	36,7	34,19	33,4
Bantaeng	18,9	17,66	17,6
Jeneponto	59,1	54,15	53,9
Takalar	29,3	27,37	27,1
Gowa	61	57,03	59,5
Sinjai	24,3	22,63	22
Maros	43,1	40,13	40,1
Pangkep	56,4	52,6	59,3
Barru	17,5	16,6	16,1
Bone	87,7	80,46	75
Sopeng	21,3	19,78	18,9
Wajo	31,9	30,34	30,1
Sidrap	17,9	16,72	16
Pinrang	32,1	29,92	30,5
Enrekang	29,7	27,6	27,6
Luwu	52	48,53	48,6
Tana Toraja	31,3	29,09	28,6
Luwu Utara	46,2	43,02	41,9
Luwu Timur	22,2	20,78	19,7
Toraja Utara	36,8	33,88	34,4
Makassar	66,4	64,23	63,2
Pare-pare	8,6	8,07	8,4
Palopo	15,5	14,59	14,5
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>863,2</b>	<b>806,35</b>	<b>797,7</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019*

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 berada pada garis kemiskinan sebesar Rp283,461,-. Dan apabila dilihat dari perkembangannya garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dimana, garis kemiskinan makanan lebih besar jika dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2008-2017*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan berikut :

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah IPM berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh IPM terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.



3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain.

1. Bagi Penulis sendiri, menambah wawasan serta pengetahuan baru dan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam menerapkan kebijakan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan referensi dan informasi untuk pengembangan penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Grand Teori.*

##### **Distribusi pendapatan**

Simon Kuznest mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik.

Konsep distribusi pendapatan dapat dibedakan menurut dua aliran ekonomi yaitu :

- a) Mazhab klasik, dimana mazhab ini berpegang pada konsep keseimbangan alokasi sumberdaya dan konsep pasar bebas, di mana harga menjadi acuan dalam proses pertukaran. Perbedaan kondisi antarsektor akan menyebabkan pertukaran dan alokasi sumberdaya yang efisien tanpa campur tangan pemerintah hingga mencapai pareto optimum.
- b) Mazhab strukturalis memandang perkembangan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan mendasar struktural.<sup>13</sup>

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Suatu cara untuk mendeteksi

---

<sup>13</sup>Wahyu Hidayat. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. (Malang: UMM Press.2017), h.25-26

masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi. Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan pokok, pakaian, perumahan dan sebagainya. Kedua adalah barang-barang mewah seperti mobil mewah, televisi, pakaian dan sebagainya.

Adapun penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman Dan Cynthia Thaf Morris ada 8 sebab yaitu<sup>14</sup>:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
- b) Inflasi, dimana pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
- c) Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.
- d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan nilai lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
- e) Rendahnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan-kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri adalah usaha untuk usaha-usaha golongan kapitalis.

---

<sup>14</sup>Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung : Alfabeta.2012), h.71-72

- g) Memburuknya nilai tukar dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB.
- h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Para ahli ekonomi membagi distribusi pendapatan menjadi dua jenis baik dengan tujuan analisis maupun kuantitatif.

#### 1. Distribusi Pendapatan Perorangan

Distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ini menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Bagaimna caranya pendapatan tersebut diperoleh tidak diperhatikan. Apakah pendapatan itu berasal dari hasil kerja semata atau dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba usaha, hadiah, warisan, dan lain-lain juga tidak diperhatikan. Oleh karena itu, menurut tingkat pendapatannya yang semakin meningkat dan kemudian membagi semua individu tersebut dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

#### 2. Distribusi Fungsional.

Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan pangsa faktor berupaya menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima tiap faktor produksi. Ketimbang memandang orang-orang sebagai entitas terpisah, teori distribusi pendapatan fungsional berusaha menemukan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase

---

<sup>15</sup>Subandi. *Ekonomi Pembangunan* . (Bandung : Alfabeta.2012), h.73

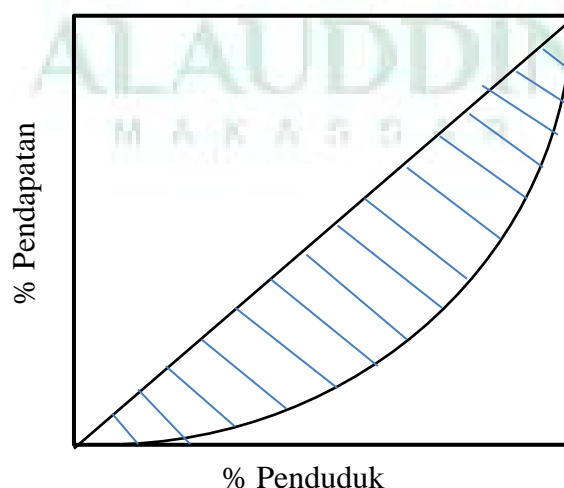
pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk uang sewa, bunga dan laba (yakni, pengembalian atas lahan serta modal keuangan dan fisik). Meski orang-orang tertentu dapat menerima pendapatan dari sumber itu, hal ini tidak dipersoalkan dalam pendekatan fungsional.<sup>16</sup>

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima dalam kurun waktu setahun. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (kemeraan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang dialami oleh penduduk dalam suatu negara. Apabila kurva Lorenz makin mendekati garis diagonal maka semakin rendah derajat ketidakmerataannya.

**Gambar 2.1**  
**Kurva Lorenz**



<sup>16</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. (Jakarta : Erlangga.2011), h.259-260

<sup>17</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung: Alfabeta.2012), h74-75

b) Koefisien Gini

Koefisien gini dihitung dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva lorenz dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar di mana kurva lorenz tersebut berada. Secara matematis rumus koefisien dapat dituliskan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum (X_i^n + 1 - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

KG = Koefisien Gini

$X_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

$Y_i$  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif di kelas  $i$

Jika, KG berkisar antara 0,50-0,70 berarti ketidakmerataan tinggi

KG berkisar antara 0,36-0,49 berarti ketidakmerataan sedang

KG berkisar antara 0,20-0,35 berarti ketidakmerataan rendah

## B. Tinjauan Variabel

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia mengukur tingkat keberhasilan dari pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa komponen seperti pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya

pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Peluang hidup berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli.<sup>18</sup>

Indeks pembangunan manusia mencoba untuk memeringkat semua negara atau daerah dari skala 0 hingga 1 berdasarkan tujuan akhir IPM yaitu:<sup>19</sup>

- a) Masa hidup yang diukur usia harapan hidup.
- b) Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dengan rata-rata sekolah (satu pertiga).
- c) Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan nilai moneter dari seluruh produksi barang jadi yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto

---

<sup>18</sup> Rosmiati Dewi, "Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) h.33

<sup>19</sup> Micahel Todaro P dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga.2004)

yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.<sup>20</sup>

- a. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan jasa lainnya.
- b. PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi & komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa.

---

<sup>20</sup>Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diakses pada Tahun 2018.



### 3. Kemiskinan

Menurut teori radikal, orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara atau daerah-daerah menjadi miskin karena direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, padahal kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak sebatas kurang makan dan kurang duit.<sup>21</sup>

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah. Di samping itu juga pengaruh keadaan luar negeri, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.

Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Di samping itu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka. Oleh karena itu, kemiskinan

---

<sup>21</sup>Wahyu Hidayat. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. (Malang: UMM Press.2017), h.28

dapat disebabkan karena sifat alamiah/kultural, yaitu masalah yang timbul di masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Di samping itu kemiskinan bisa disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.<sup>22</sup>

Bank dunia (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis, termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, dan kepercayaan diri kurang.

Sharp, et.al mengidentifikasi ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b) Kemiskinan timbul akibat kualitas sumber daya manusia.
- c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya

---

<sup>22</sup>Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung : Alfabeta.2012) h.77-78

<sup>23</sup>Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung : Alfabeta.2012) h.78

pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkes pada tahun 1953 yang mengatakan bahwa : *a poor country is poor because poor* (negara miskin iitu miskin karena miskin).

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>24</sup>

- a) Kemiskinan absolut, dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, hal ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. kesulitan dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.
- b) Kemiskinan relatif adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah

---

<sup>24</sup> Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. (Bandung: Alfabeta.2012), h.79-80

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih di anggap miskin.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Konsep ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut, dan karena konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, maka kemiskinan akan selalu ada.

### ***C. Keterkaitan Antar Variabel***

#### **1. Hubungan IPM dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Becker menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan. Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dan menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan penduduk dapat ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Hidayat, M. H., & Nugroho, S. (2014). “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Investasi terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*”. h.34-35

## 2. Hubungan PDRB dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu wilayah regional atau daerah dalam periode tertentu. Bank Indonesia (2016) perkembangan perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia, maka setiap daerah akan memiliki jumlah PDRB yang berbeda. Semakin besar potensi sumber daya yang tersedia dan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi sumber daya yang ada maka akan semakin besar pula PDRB wilayah tersebut.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan hipotesis Kuznest yang menyatakan bahwa hubungan PDRB dengan ketimpangan seperti kurva U terbalik, yaitu dalam jangka pendek berhubungan positif namun dalam jangka panjang berhubungan negatif.

## 3. Hubungan Penduduk miskin dengan ketimpangan Distribusi Pendapatan

Jumlah penduduk miskin sangat berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Dimulai dari seseorang yang terlahir di dalam lingkungan keluarga kurang mampu dan biasanya cenderung memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga memiliki keterbatasan untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena rendahnya pendidikan yang ditempu maka individu tersebut kesulitan bersaing mencari pekerjaan dalam kompetisi di sektor formal sehingga satu-satunya pilihan adalah

---

<sup>26</sup>Wicaksono, D.T. (2018).” *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015*”. h.43

pekerjaan informal. Dengan terbatasnya modal dan pengetahuan maka pekerjaan yang dijalankan hanya menghasilkan upah yang rendah dan pada akhirnya semakin banyak jumlah penduduk miskin maka semakin banyak pula masyarakat yang berpendapatan rendah dan hal ini akan semakin memperlebar jarak ketimpangan pendapatan antara golongan penduduk berpendapatan rendah dan golongan penduduk berpendapatan tinggi.<sup>27</sup>

#### **D. Peneliti Terdahulu**

Salma Audiena Al Faizah (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi. Variabel penelitian yang digunakan ialah jumlah penduduk, IPM dan Investasi dengan hasil penelitian yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan variabel IPM dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi.<sup>28</sup>

Andi Samsir dan Abdul Rahman (2018) dengan judul penelitian “Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota dengan variabel penelitian yaitu desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, IPM dan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa desentralisasi fiskal, dan aglomerasi tidak berpengaruh signifikan sedangkan tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah

---

<sup>27</sup>Wicaksono, D. T. (2018). *”Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015.*

<sup>28</sup> Al Faizah, S.A. (2018). *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi (Tahun 2011-2015) ”.*

penduduk berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.<sup>29</sup>

Reza Maulana Dwiputra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dengan variabel dependen yaitu indeks gini dan variabel independen yaitu PDRB, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM berpengaruh signifikan negatif sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif.<sup>30</sup>

Aldi Abdullah Arif (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016 dengan variabel penelitian yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, UMP dan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif sedangkan PDRB dan kemiskinan berpengaruh positif. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Sumatera.<sup>31</sup>

Riri Yuliani (2018) dengan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel yang digunakan ialah IPM, PDRB dan Kemiskinan dengan hasil penelitian variabel PDRB dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>29</sup>Syamsir, A., & Rahman, A.(2018), “*Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota*. EcceS, 5(1), 22-42.

<sup>30</sup>Dwiputra, R.M. (2018) “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode (2011-2016)*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB), 6(2).

<sup>31</sup>Arif, A. A. (2018).”*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016.*”

sedangkan variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.<sup>32</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir menggambarkan arah penelitian dan bertujuan untuk memudahkan penelitian. Untuk itu kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

IPM merupakan variabel penelitian pertama karena IPM menunjukkan seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam suatu daerah. Ini disebabkan oleh IPM itu sendiri merupakan gabungan dari tiga unsur kesejahteraan yaitu pendapatan (daya beli masyarakat), pendidikan dan kesehatan.

PDRB merupakan variabel penelitian yang kedua yang diambil karena PDRB akan menunjukkan ada atau tidaknya pertumbuhan perekonomian untuk melihat apakah pembangunan ekonomi di daerah tersebut berhasil atau tidak yang memunculkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

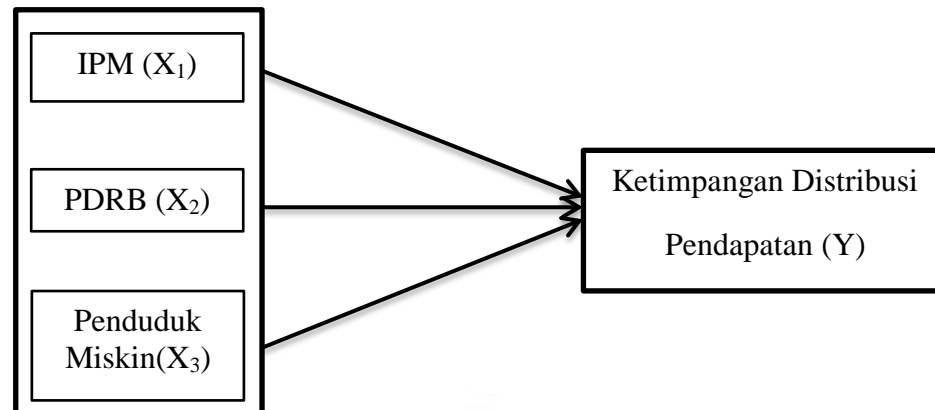
Penduduk miskin merupakan variabel penelitian yang ketiga karena ketika perekonomian mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh PDRB daerah yang bersangkutan jika terdapat penduduk miskin di daerah tersebut berarti ada indikasi adanya penyebaran pendapatan yang tidak merata.

---

<sup>32</sup>Yuliani, R. (2018). *“Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya”*.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



#### **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji.<sup>33</sup>

Berdasarkan kajian teoritis dan permasalahan yang ada maka peneliti menetapkan dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan
2. Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

---

<sup>33</sup>Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Penadamedia Group.2011), h.79

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik.<sup>34</sup>

Adapun lokasi penelitian ini yaitu berada di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan eksplanatori. Pada pendekatan penelitian eskplanatori, penjelasan hubungan antar variabel dilakukan inferensi (penarikan kesimpulan) melalui pengujian hipotesis.<sup>35</sup> Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan saling dihubungkan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabelnya saling mempengaruhi.

---

<sup>34</sup>A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. (Jakarta : Kencana.2014), h.43

<sup>35</sup> Solimun, Arjun, Adji Achmad Rinaldo F. *Metode Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*. (Malang : UB Press), h.7

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif terdiri dari koefisien gini, PDRB, IPM dan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut merupakan data time series yaitu data secara yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam hal ini data yang digunakan berupa data periode tahun 2008-2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a) Data indeks gini di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017
- b) Data PDRB atas dasar harga berlaku di provinsi Sulawesi Selatan.
- c) Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017
- d) Data IPM di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017

#### **2. Sumber Data**

Adapun data yang diperoleh merupakan hasil browsing dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa dokumen, ataupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian, untuk tujuan penelitian di mana data yang diperlukan adalah data Provinsi Sulawesi Selatan meliputi data PDRB, IPM dan jumlah penduduk miskin dengan periode data yang diambil mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2017.

### E. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier data panel untuk mengetahui hubungan antara PDRB, IPM, dan jumlah penduduk miskin terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen dalam hal ini PDRB, IPM dan jumlah penduduk miskin mempengaruhi variabel independen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Fungsi persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (3.1)$$

Persamaan tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model persamaan non-linear berganda dengan transformasi log linear sebagai berikut:

$$Y = B_0 \cdot X_1^{\beta_1} \cdot X_2^{\beta_2} \cdot X_3^{\beta_3} \cdot \mu^e \dots \dots \dots (3.2)$$

Kemudian fungsi tersebut di transformasikan ke dalam model persamaan regresi linear berganda dengan transformasi log Linear (ln) sebagai berikut:

$$\ln Y : \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \mu^e \dots \dots \dots (3.3)$$

Di mana :

Y : Ketimpangan distribusi pendapatan

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

$X_1$  : IPM (Persen)

$X_2$  : PDRB (Rupiah)

$X_3$  : Jumlah penduduk miskin (orang)

$i$  : Data *Cross-Section* Kabupaten/Kota di Sul-Sel

$t$  : Data *Time-Seriess*, Tahun 2008-2017

$\mu$  : Standar eror

### 1. Analisis Data Panel

Data panel merupakan gabungan dua data yaitu data *time series* dan *cross section*.<sup>36</sup>

#### a. Metode Commonn Effect

Metode common Effect merupakan teknik ynag paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *crosss section*. metode Ordinary Least Squares (OLS) untuk mengestimasi model data panel yang dikenal sebagai estimasi common effect.

#### b. Metode Fixed Effect

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan interep antara variabel independen namun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antar daerah dan antar waktu.<sup>37</sup>

#### c. Metode Random

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap

---

<sup>36</sup> Agus Widarjono. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi 4*.(Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2013), h.354

<sup>37</sup> Agus Widarjono. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi 4*.(Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2013), h.232

setiap kabupaten/kota mempunyai intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variabel random.

## **2. Pemilihan Model dalam Pengolahan Data**

### **a. Uji Chow Test**

Uji Chow Test dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan pooled least square atau fised effect. Hipotesis dari Chow Test adalah:

- $H_0$  : Menggunakan model PLS
- $H_1$  : Menggunakan model Fixed effect

Apabila nilai F statistik  $< F$  tabel maka hipotesis nol diterima. Sedangkan jika nilai F statistik  $> F$  tabel maka hipotesis nol di tolak.

### **b. Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk memilih model Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Hipotesis dari uji Hausman yaitu:

- $H_0$  : Random Effect Model
- $H_1$  : Fixed Effect Model

Apabila nilai Probabilitas Hausman  $< 0.05$  maka hipotesis nol ditolak. Sedangkan jika nilai probabilitas Hausman  $> 0.05$  maka hipotesis nol diterima.

## **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta : Rajawali Pers.2016), h.92

#### a Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas  $\geq 0,05$  maka dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.<sup>39</sup>

#### b Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolonieritas adalah kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel eksogen yang masuk pada model. Sehingga signifikansi yang digunakan akan menolak hipotesis nol akan semakin besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak sah (valid) untuk menaksir variabel endogen.

Menguji adanya kasus multikolonieritas adalah dengan nilai VIF (*variance inflation faktor*) dan koefisien kolerasi antarvariabel bebas. Apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolonieritas.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta : Rajawali Pers.2016), h.93

<sup>40</sup> Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta: Rajawali pers.2016), h.102-

c Uji Heteroskedisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.<sup>41</sup> Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedisitas dapat dilakukan melalui beberapa pengujian yaitu Uji Park, Uji Glejser, Uji White, dan Uji Harvey. Kriteria pengujiannya yaitu :

- Jika nilai probabilitas  $>$  dari 0.05 maka bebas heteroskedisitas
- Jika nilai probabilitas  $<$  dari 0.05 maka terdapat heteroskedisitas

d Uji Autokolerasi

Autokolerasi artinya adanya kolerasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross sectional). Konsekuensi dari adanya autokolerasi khususnya model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Untuk mendeteksi adanya autokolerasi dalam suatu model regresi, dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson. Kriteria pengujian Durbin-Watson sebagai berikut<sup>42</sup>:

**Tabel 3.1**

Tabel Autokolerasi	
$<1.10$	Ada autokolerasi
1.10 s.d. 1.54	Tanpa simpulan
1.55 s.d 2.46	Tidak ada autokolerasi

<sup>41</sup>Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*. (Semarang: BP UNDIP..2001)

<sup>42</sup>Imam Gunawan.. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta: Rajawali pers.2016) h.100



Tabel Autokolerasi	
2.46 s.d. 2.90	Tanpa simpulan
>2.91	Ada autokolerasi

#### 4. Uji Hipotesis

##### a Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah PDRB, IPM dan penduduk miskin (variabel independen) bersama-sama mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan (variabel dependen).

Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2.  $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yang artinya PDRB, IPM dan penduduk miskin bersama-sama tidak mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya PDRB, IPM, dan penduduk miskin bersama-sama mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

b Uji Statistik (t)

Uji T dilakukan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Perumusan hipotesisnya yaitu:

Jika  $H_0 : \beta_1 = 0$  maka, variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $H_1 : \beta_1 \neq 0$  maka, variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Jika probabilitas  $< 0.05$ , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- Jika probabilitas  $> 0.05$ , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan

c Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Koefisien determinansi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin besar variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

Nilai  $R^2$  *Square* dapat mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dari penambahan atau pengurangan variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

## F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapapun, berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna).<sup>43</sup> Koefisien gini dihitung dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva lorenz dibandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar di mana kurva lorenz tersebut berada. Secara matematis rumus koefisien dapat dituliskan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum (X_i^n + 1 - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

KG = Koefisien Gini

$X_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

$Y_i$  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif di kelas  $i$

Jika, KG berkisar antara 0,50-0,70 berarti ketidakmerataan tinggi

KG berkisar antara 0,36-0,49 berarti ketidakmerataan sedang

KG berkisar antara 0,20-0,35 berarti ketidakmerataan rendah

2. PDRB merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas*. (Jakarta: Erlangga.2011), h.257

<sup>44</sup> Prof Mudrajat Kuncoro, Ph.D. *Mudah memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2015) h.229

Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.<sup>45</sup>

3. IPM pada dasarnya adalah gabungan dari tiga unsur kemakmuran yaitu pendapatan (daya beli masyarakat), pendidikan dan kesehatan.<sup>46</sup> Untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran} \times 100$$

Keterangan

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

I : Indeks Komponen

Pengukurang masing –masing komponen secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut :

- Dimensi Kesehatan

$$Ikesehatan = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan :

<sup>45</sup>Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diakses pada Tahun 2018.

<sup>46</sup> Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Jakarta : Rajawali Pers.2015), h.73

I : Indeks Komponen

AHH : angka harapan hidup

AHH<sub>min</sub> : angka harapan hidup terendah

AHH<sub>maks</sub> : angka harapan hidup tertinggi

- Dimensi Kesehatan

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan :

I : Indeks Komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLS<sub>min</sub> : harapan lama sekolah terendah

HLS<sub>maks</sub> : harapan lama sekolah tertinggi

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

I : Indeks Komponen

RLS : rata-rata lama sekolah

HLS<sub>min</sub> : rata-rata lama sekolah terendah

HLS<sub>maks</sub> : rata-rata lama sekolah tertinggi

$$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

- Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Keterangan :

$I_n$  : Indeks Komponen

$Pengeluaran_{min}$  : Pengeluaran terendah

$Pengeluaran_{maks}$  : Pengeluaran tertinggi

4. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.<sup>47</sup> Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan :

$\alpha$  : 0

$z$  : garis kemiskinan

$y_i$  : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  : jumlah penduduk

---

<sup>47</sup>Prof.Mudrajad Kuncoro, Ph.D. *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. (Yogyakarta. UPP STIM YKPN.2015), h.195

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Wilayah dan Fokus Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Secara geografi, Sulawesi Selatan terletak antara  $0^{\circ} 12'$  lintang utara dan  $8^{\circ}$  lintang selatan dan antara  $116^{\circ} 48'$ - $122^{\circ} 36'$  bujur timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang  $0^{\circ}$ . Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat di bagian utara, Teluk Bone di bagian timur, Laut Flores di bagian selatan dan Selat Makassar di bagian barat.<sup>48</sup>

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yaitu terdiri dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Makassar, Pare-pare, dan Palopo.

##### **2. Kondisi Kependudukan**

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 mencapai 181 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di beberapa kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kota Makassar dengan kepadatan

---

<sup>48</sup>Badan Pusat Statistik, diakses tahun 2019

penduduk mencapai 7764 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di kabupaten Luwu Timur sebesar 36 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berikut ini jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Sulawesi Selatan Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Ribuan)			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1. Kepulauan Selayar	63.968	69.035	133.003	92,66
2. Bulukumba	196.426	219.287	415.713	89,57
3. Bantaeng	89.494	96.087	185.581	93,14
4. Jeneponto	173.771	186.016	359.787	93,42
5. Takalar	140.870	152.113	292.983	92,61
6. Gowa	368.234	379.966	748.200	96,91
7. Sinjai	116.766	124.442	241.208	93,83
8. Maros	169.433	176.950	346.383	95,75
9. Pangkep	159.611	170.180	329.791	93,79
10. Barru	83.082	89.685	172.767	92,64
11. Bone	358.889	392.137	751.026	91,52
12. Soppeng	106.591	119.875	226.466	88,92
13. Wajo	189.379	206.204	395.583	91,84
14. Sidrap	145.003	151.122	296.125	95,95
15. Pinrang	180.586	191.644	372.230	94,23
16. Enrekang	102.117	101.203	203.320	100,9
17. Luwu	174.829	181.476	356.305	96,34
18. Tana Toraja	117.030	114.489	231.519	102,22
19. Luwu Utara	154.594	153.407	308.001	100,77
20. Luwu Timur	147.984	139.890	287.874	105,79
21. Toraja Utara	114.509	113.905	228.414	100,53
22. Makassar	737.146	751.865	1.489.011	98,04
23. Pare-pare	69.822	72.275	142.097	96,61
24. Palopo	85.967	90.940	176.907	94,53
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>4.246.101</b>	<b>4.444.193</b>	<b>8.690.294</b>	<b>95,54</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019



Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah penduduk terbesar yang ada di provinsi Sulawesi Selatan berada di kota Makassar yaitu sebesar 1.489.011 jiwa yang terdiri dari 737.146 laki-laki dan 751.865 perempuan. Sedangkan *sex ratio* atau rasio jenis kelamin di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 95,94 atau kurang dari 100. Hal ini berarti bahwa distribusi jenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

### **3. Kondisi Ekonomi**

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Laju pertumbuhan perekonomian provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2017 rata-rata sebesar 7,4 persen. Angka ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu sebesar 5,21 persen dengan periode yang sama.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dua puluh empat kabupaten/kota sehingga memiliki nilai PDRB yang bervariasi karena setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda pula. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu daerah yaitu melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB kemudian dibedakan menjadi dua yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. Indikator PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp418.931,18 Miliar sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp288.908,62 Miliar rupiah.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Badan Pusat Statistik, diakses tahun 2019

Pada tahun 2017 Makassar merupakan kota dengan kontribusi terbesar berdasarkan PDRB ADHB yaitu 34,03 dan Kep.Selayar mempunyai kontribusi terkecil sebesar 1.25%. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**PDRB ADHB dan ADHK Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	PDRB Tahun 2017		Persentase Kontribusi
	ADHB	ADHK	
1, Kepulauan Selayar	5276,74	3147,39	1,25
2, Bulukumba	12174,86	7734,71	2,89
3, Bantaeng	6951,08	4694,36	1,66
4, Jeneponto	8645,02	5967,18	2,06
5, Takalar	8576,54	5804,57	2,04
6, Gowa	17271,38	11977,3	4,11
7, Sinjai	9189,91	6218,72	2,18
8, Maros	19451,38	12768,32	4,62
9, Pangkep	22309,72	15433,5	5,30
10, Barru	5970,1	4169,98	1,42
11, Bone	29405,4	18974,05	6,99
12, Soppeng	8947,11	6012,11	2,13
13, Wajo	17897,72	12229,04	4,25
14, Sidrap	11955,38	7639,46	2,84
15, Pinrang	16411,36	112113,63	3,90
16, Enrekang	6412,46	4168,97	1,52
17, Luwu	13041,82	8567,87	3,10
18, Tana Toraja	6084,15	3942,6	1,45
19, Luwu Utara	10800,79	7081,17	2,57
20, Luwu Timur	20250,36	15318,72	4,81
21, Toraja Utara	7788,79	4422,65	1,85
22, Makassar	143128,68	103857,09	34,03
23, Pare-pare	6111,15	4394,8	1,45
24, Palopo	6550,69	4746,94	1,56
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>418931,58</b>	<b>288908,62</b>	<b>100,00</b>

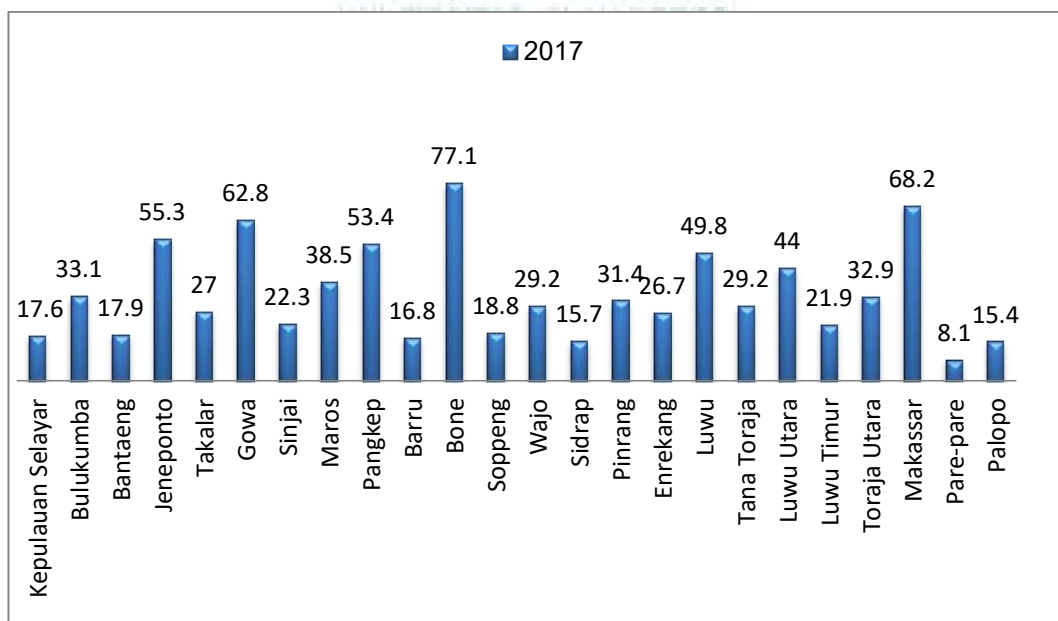
*Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Makassar merupakan kota yang memiliki nilai PDRB tertinggi baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun

atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp143.128,68 Milyar berdasarkan harga berlaku dan Rp.103.857,09 Milyar berdasarkan harga konstan. Sedangkan Kep. Selayar merupakan kabupaten dengan tingkat PDRB terendah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp5.276,74 Milyar berdasarkan atas dasar harga berlaku dan Rp3.147,39 Miliyar atas dasar harga konstan.

Indikator lain yang dapat dilihat untuk melihat kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah melalui jumlah penduduk miskin yang berada dalam wilayah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan sejahtera jika jumlah penduduk miskin yang berada didaerah tersebut tergolong rendah bahkan tidak ada sama sekali. Berikut ini disajikan tentang jumlah penduduk miskin yang berada di provinsi Sulawesi Selatan.

**Diagram 4.1**  
**Jumlah penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2017**

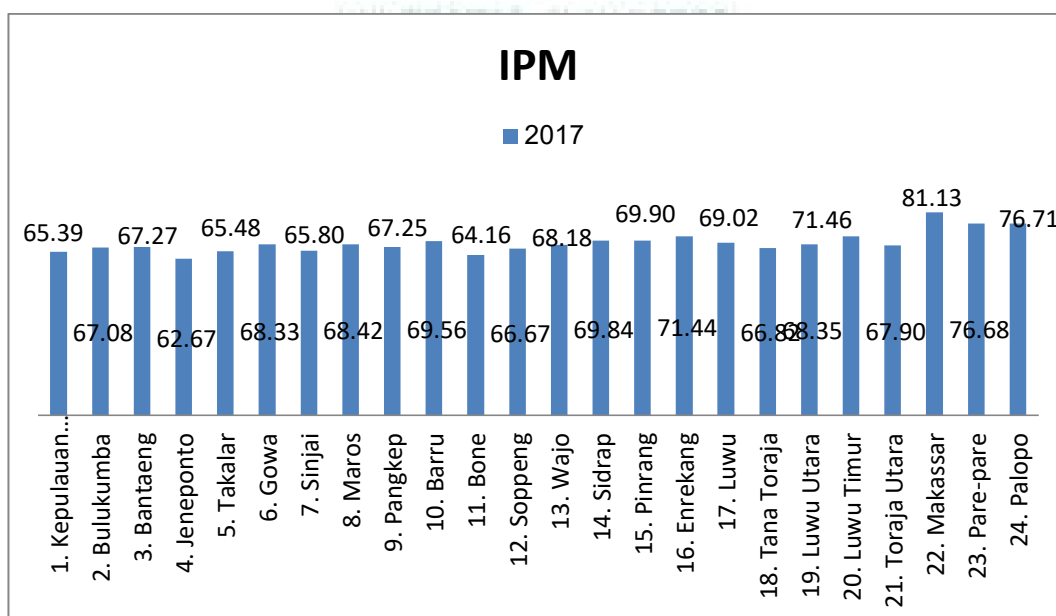


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Berdasarkan Diagram 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan sangat beragam. Kabupaten Bone merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 71.7 ribu jiwa. Sedangkan Kota Pare-pare merupakan daerah dengan jumlah penduduk terendah di provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8.1 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal, di mana menurut teori *human capital* bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sehingga menurut Becker IPM berpengaruh terhadap ketimpangan. Berikut ini nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan :

**Diagram 4.2**  
**IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2019

Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Makassar memiliki nilai IPM tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya berada di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 81.13. Sedangkan Jeneponto memiliki nilai IPM terendah yaitu sebesar 62.67 di provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemilihan Model dalam Mengolah Data**

#### **a. Uji Chow**

Uji Chow Test dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan pooled least square atau fixed effect. Hipotesis dari Chow Test adalah:

- $H_0$  : Menggunakan model PLS
- $H_1$  : Menggunakan model Fixed effect

Jika nilai probabilitas  $< (\alpha : 5\%)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengolahan Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section F	18.243.501	-23,213	0.0000
Cross-Section Chi-Square	261.251.275	23	0.0000

*Sumber : Hasil Olah Data Sekendur, Tahun 2019*

Berdasarkan hasil pengujian uji chow didapatkan hasil nilai chi-square adalah sebesar 261.251275 dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$ , sehingga secara statistik menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Berdasarkan estimasi model

yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan estimasi *fixed effect model*.

## b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Hipotesis dari uji Hausman yaitu:

- $H_0$  : Random Effect Model
- $H_1$  : Fixed Effect Model

Apabila nilai Probabilitas Hausman  $< 0.05$  maka hipotesis nol ditolak. Sedangkan jika nilai probabilitas Hausman  $> 0.05$  maka hipotesis nol diterima.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Period random	15.779.446	3	0.0013

*Sumber: Hasil Olah Data Sekundur, Tahun 2019*

Berdasarkan dari hasil pengujian *hausman test* didapatkan bahwa hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 15.779446 dengan probabilitas  $0.0013 < 0.05$ . Sehingga secara statistik menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Maka estimasi model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

## 2. Uji Asumsi Klasik

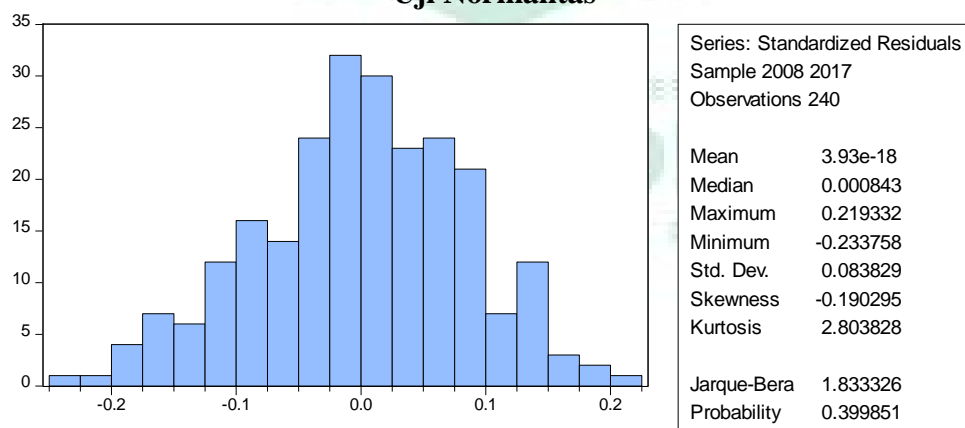
Sebelum melakukan pengujian regresi panel terhadap hipotesis penelitian, uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab

hipotesis penelitian.<sup>50</sup> Hasil pengujian yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang mendasari model regresi data panel. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas  $\geq 0,05$  maka dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.<sup>51</sup>

**Grafik 4.1**  
**Uji Normalitas**



Sumber : Output Eviews( data sekunder diolah, Tahun 2019)

<sup>50</sup>Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta : Rajawali Pers.2016), h.92

<sup>51</sup>Imam Gunawan. *Pengantar Statistika Inferensial*. (Jakarta : Rajawali Pers.2016), h.93

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas  $0.399851 \geq 0.05$  maka dinyatakan berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan hubungan antar variabel independen. Model yang baik seharusnya memiliki kolerasi yang rendah antara variabel independen. Berdasarkan uji pairwise Corelation jika nilainya  $< 0.8$  maka kolerasinya cukup rendah sedangkan jika nilainya  $>$  maka kolerasinya cukup tinggi.

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolonieritas**

	LN_IPM	LN_PDRB	LN_PM
LN_IPM	1.000.000	0.058721	-0.065448
LN_PDRB	0.058721	1.000.000	0.383378
LN_PM	-0.065448	0.383378	1.000.000

*Sumber : Hasil Olah Data Sekendur, Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai variabel independen  $< 0.8$  yang berarti bahwa tidak ada kolerasi antar variabel independen.

#### c. Uji Auto Kolerasi

Autokolerasi artinya adanya kolerasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross sectional). Berdasarkan pengambilan keputusan jika  $DL < DW < 4-DU$  maka tidak terjadi autokolerasi.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokolerasi**

Durbin-Watson stat	1.906.265
--------------------	-----------

*Sumber : Hasil Olah Data Sekendur, Tahun 2019*



Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Eviews 10 disimpulkan bahwa DW sebesar 1.906265, DL sebesar 1.592, DU 1.758, 4-DL sebesar 2.408 dan 4-DU sebesar 2.242. hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokolerasi karena nilai  $DL < DW < 4-DU$ .

#### d. Uji Heteroskedesitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.<sup>52</sup> Kriteria pengujiannya yaitu :

- Jika nilai probabilitas > dari 0.05 maka bebas heteroskedisitas
- Jika nilai probabilitas < dari 0.05 maka terdapat heteroskedisitas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Heteroskedesitas**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243282	0.219845	1.106.608	0.2697
LN_IPM	0.003839	0.004501	0.853106	0.3946
LN_PDRB	-0.016462	0.009627	-1.709.925	0.0887
LN_PM	-0.000720	0.046855	-0.015371	0.9878

Sumber : Output Eviews 10, Data Diolah Tahun 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedesitas di atas menunjukkan nilai probabilitas data IPM sebesar  $0.3946 > 0.05$ , probabilitas data PDRB sebesar  $0.0887 > 0.05$ , dan probabilitas data penduduk miskin sebesar  $0.9878 > 0.05$  disimpulkan bahwa variabel independen tidak terjadi heteroskedesitas.

<sup>52</sup>Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss.*(Semarang: BP UNDIP. 2001)

### 3. Hasil Analisis Data Panel

Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan model yang terpilih ialah model *fixed effect*. Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Adapun hasil estimasi data panel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Estimasi Data Panel dengan *Fixxed Effext Model***

Variabel	Coefficient	Std, Error	Prob,
C	-2,2027	0,2802	0,0000
LN_IPM	-0,0073	0,0073	0,3300
LN_PDRB	0,1554	0,1554	0,0000
LN_PM	-0,0676	-0,0676	0,2403
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variabls)			
R-Squared	0,7170	Mean dependent var	-1,1101
Adjust R-Squared	0,6824	S,D, Dependent var	0,1575
S,E, of regression	0,0887	Akaike info criterion	-1,8992
Sum square resid	1,6795	Schwarz criterion	-1,5076
Log likelihood	254,9108	Hannan-Quinn criterion	-1,7414
F-statistic	20,7560	Durbin-Watson stat	1,9062
Prob(F-statistic)	0,0000		

Sumber : Hasil Olah Data Sekendur, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas diketahui nilai probabilitas untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto signifikan karena  $> 0.05$ . Sedangkan variabel Indeks Pemabangunan Manusia dan penduduk miskin nilai probabilitaasnya  $< 0.05$  sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

### a. Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Koefisien determinansi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin besar variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	-2,2027	0,2802	-7,8550	0,0000
LN_IPM	-0.0073	0.00735	-0.9763	0.3300
LN_PDRB	0.1554	0.00735	11,9004	0.0000
LN_PM	-0.0676	0.05749	-1,1774	0.2403

*Sumber :Hasil Olah Data Sekunder , Tahun 2019*

Berdasarkan analisis regresi panel dihasilkan persamaan berikut :

$$\text{LnY} : \beta_0 + \beta_1 \text{LnX}_{1it} + \beta_2 \text{LnX}_{2it} + \beta_3 \text{LnX}_{3it} + \mu^e$$

$$\text{LnY} = -2.2027 + 0.1554 \text{LnX}_{1it} - 0.0073 \text{LnX}_{2it} - 0.0676 \text{LnX}_{3it} + \mu^e$$

Dari hasil regresi panel dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Nilai konstanta

Nilai konstanta sebesar -2.2027 berarti jika IPM, PDRB dan jumlah penduduk miskin nilainya 0 atau konstan maka ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan sebesar -2.2027.

#### 2. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Varibel bebas indeks pembangunan manusia (X1) mempunyai koefisien regresi sebesar -0.0073 yang menunjukkan IPM bernilai

negatif. Artinya jika IPM bertambah 1% maka akan menyebabkan ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar 0.0073 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (X2)

Variabel bebas PDRB (X2) memiliki koefisien sebesar 0.1554 yang menunjukkan PDRB bernilai positif. Artinya jika PDRB bertambah 1% maka akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0.1554 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

### 4. Jumlah Penduduk Miskin (X3)

Variabel bebas jumlah penduduk miskin (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar -0.0676 yang menunjukkan jumlah penduduk miskin bernilai negatif. Artinya jika jumlah penduduk miskin bertambah 1% maka akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan sebesar 0.0676 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

### 5. Koefisien Determinasi.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa koefisien determinasi diperoleh sebesar 0.7170. Hal ini berarti bahwa sebanyak 71.70% ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penduduk miskin sedangkan sisanya yaitu 28.30%

ketimpangan distribusi pendapatan dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diteliti berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian adalah:

- Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F dari estimasi *fixed effect***

R-squared	0.7170
Adjusted R-squared	0.6824
S.E. of Regression	0.0887
F-statistic	20.7560
Prob(F-statistic)	0.0000

*Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, Tahun 2019*

Berdasarkan uji data panel dengan model regresi model *fixed effect* diperoleh nilai F-statistik sebesar 20.7560 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh pada variabel dependen

#### c. Uji Statistik (T)

Uji T dilakukan untuk menguji setiap variabel independen (PDRB, IPM dan jumlah penduduk miskin) secara individu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika probabilitas  $< 0.05$ , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- Jika probabilitas  $> 0.05$ , berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan

**Tabel 4.11**  
**Hasil statistik t-hitung**

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LN_IPM	-0.0073	0.0073	-0.9763	0.3300	Tidak Signifikan
LN_PDRB	0.1554	0.0073	11.9004	0.0000	Signifikan
LN_PM	-0.0676	0.0574	-1.1774	0.2403	Tidak Signifikan

*Sumber : Output Eviews 10, Data Sekunder Diolah Tahun 2019*

1. Pengujian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Koefisien variabel indeks pembangunan manusia sebesar -0.0073 dengan t-statistik sebesar -0.9763 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.3300  $> 5\%$  sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (ketimpangan pendapatan).

2. Pengujian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Koefisien variabel PDRB sebesar 0.1554 dengan t-statistik sebesar 11.9004 sedangkan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$  sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (ketimpangan pendapatan).

3. Pengujian terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Koefisien variabel jumlah penduduk miskin sebesar -0.0676 dengan t-statistik sebesar -1.1774 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0.2403

(>5%) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (ketimpangan pendapatan).

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Becker, IPM berpengaruh terhadap ketimpangan, namun Becker sendiri hanya mengkaji mengenai peran pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam IPM terdapat tiga komponen pembentuk yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Sehingga estimasi yang dilakukan dengan mengambil semua komponen pembentuk IPM akan berbeda jika hanya mengambil salah satu komponen pembentuk saja.

Berdasarkan hasil pengumpulan data sendiri dapat dilihat di mana IPM di provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tiap tahunnya namun di sisi lain gini rasio meskipun berfluktuasi tapi juga cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya selama sepuluh tahun terakhir.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Salma Audiena Al Faizah (2018) dengan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi. Yang menyatakan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi. Begitu pula dengan Reza Maulana Dwiputra (2018) dalam skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti hipotesis awal ditolak.

Rasio gini di Provinsi Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto pada periode yang sama juga terus mengalami peningkatan. Hal ini juga sesuai dengan teori kuznest yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek PDRB berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan



yang artinya meningkatnya pendapatan juga akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riri Yuliani (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan hasil penelitian PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Sedangkan penelitian tidak sejalan dengan Reza Maulana Dwiputra (2018) dengan skripsi “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya mengalami penurunan tetapi gini rasionya cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tolak ukur kemiskinan tidak hanya dilihat dari seberapa besar jumlah penduduk miskin yang ada di suatu wilayah tertentu. BPS sendiri menggunakan 3 indikator kemiskinan yaitu

persentase penduduk miskin yang berada di garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Tulus Wicaksono (2018) dengan judul penelitian Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Aldi Abdullah Arif (2018), dan Riri Yuliani (2018) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti bahwa IPM tidak dapat membuktikan keterkaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
3. Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti jumlah penduduk miskin tidak dapat membuktikan keterkaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Saran**

1. Ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan perlu ditindak lanjuti dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah baik

berupa kebijakan ekonomi maupun non ekonomi sehingga tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Pemberdayaan sumber daya manusia terutama di daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan dan ekonomi dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faizah, S.A. 2018. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi (Tahun 2011-2015)*”
- Arif, A. A.2018.”*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016.*”
- Arjun, Solimun dan Adji Achmad Rinaldo F. *Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*. Malang: UB Press.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya, Edisi tajwid*, ( PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).
- Dewi, Rosmiati.(2018). “*Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016*”
- Dwiputra, R.M. (2018) “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode (2011-2016).*”
- Ghozali, Imam.(2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*.Semarang: BP UNDIP
- Gunawan, Imam.2016. *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hidayat, M. H., & Nugroho, S.2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Investasi terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*.
- Hidayat, Wahyu.2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: UMM Press
- <http://Sulsel.bps.go.id>
- Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*. Semarang : BP UNDIP.
- Kuncoro, Mudrajad.2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Kuncoro, Mudrajad.2015. *Mudah memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noor, Juliansyah.2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penadamedia Group
- Oktavianty, O.2018. *Analisis Determinan Penawaran Tenaga Kerja di Sektor Informal Kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa (Subsektor Pedagang Kaki Lima)*
- Shihab, M. Quraish.2002.*Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol 14*.Jakarta: Lentera Hati
- Sjafrizal.2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi.2012. *Ekonomi Pembangunan*.Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono.2015. *Makroekonomi Teori Pengantar*.Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsir, A., & Rahman, A.2018, “*Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota*. EcceS, 5(1)
- Tambunan, Tulus.2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith.2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith.2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, D. T.2018. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015*.
- Widarjono, Agus.2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi 4*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliani, R. (2018). “*Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*
- Yusuf, A. Muri.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian gabungan*.Jakarta : Kencana

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Pemilihan Dalam Mengolah Data

- Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.243501	(23,213)	0.0000
Cross-section Chi-square	261.251275	23	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LN\_GINIRASIO  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/18/19 Time: 11:39  
Sample: 2008 2017  
Periods included: 10  
Cross-sections included: 24  
Total panel (balanced) observations: 240

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.410337	0.105530	-13.36433	0.0000
LN_IPM	-0.011475	0.011457	-1.001553	0.3176
LN_PDRB	0.071804	0.011413	6.291497	0.0000
LN_PM	-0.080685	0.017805	-4.531619	0.0000
R-squared	0.159512	Mean dependent var	-1.110113	
Adjusted R-squared	0.148827	S.D. dependent var	0.157580	
S.E. of regression	0.145382	Akaike info criterion	-1.002376	
Sum squared resid	4.988085	Schwarz criterion	-0.944366	
Log likelihood	124.2852	Hannan-Quinn criter.	-0.979002	
F-statistic	14.92971	Durbin-Watson stat	0.628047	
Prob(F-statistic)	0.000000			

File Edit View Object Properties Help



- Uji Hausman

## Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	15.779446	3	0.0013

## Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LN_IPM	-0.005538	-0.007031	0.000001	0.0431
LN_PDRB	-0.002771	0.015695	0.000022	0.0001
LN_PM	-0.015629	-0.031673	0.000016	0.0001

## Period random effects test equation:

Dependent Variable: LN\_GINIRASIO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/18/19 Time: 11:40

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 240

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.008402	0.102544	-9.833813	0.0000
LN_IPM	-0.005538	0.009813	-0.564365	0.5731
LN_PDRB	-0.002771	0.013422	-0.206433	0.8366
LN_PM	-0.015629	0.017050	-0.916694	0.3603

## Effects Specification

ALAUDDIN  
MAKASSAR

### Uji Data Panel yang terpilih

Dependent Variable: LN_GINIRASIO				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/18/19 Time: 11:39				
Sample: 2008 2017				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 24				
Total panel (balanced) observations: 240				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.202748	0.280425	-7.855038	0.0000
LN_IPM	-0.007356	0.007534	-0.976308	0.3300
LN_PDRB	0.155468	0.013064	11.90045	0.0000
LN_PM	-0.067691	0.057491	-1.177423	0.2403
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.717003	Mean dependent var	-1.110113	
Adjusted R-squared	0.682459	S.D. dependent var	0.157580	
S.E. of regression	0.088798	Akaike info criterion	-1.899257	
Sum squared resid	1.679515	Schwarz criterion	-1.507685	
Log likelihood	254.9108	Hannan-Quinn criter.	-1.741482	
F-statistic	20.75609	Durbin-Watson stat	1.906265	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji Heterokedesitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.243282	0.219845	1.106608	0.2697
LN_IPM	0.003839	0.004501	0.853106	0.3946
LN_PDRB	-0.016462	0.009627	-1.709925	0.0887
LN_PM	-0.000720	0.046855	-0.015371	0.9878

### Uji Multikoloneiritas

LN_IPM	1.000000	0.058721	-0.065448
LN_PDRB	0.058721	1.000000	0.383378
LN_PM	-0.065448	0.383378	1.000000



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. H. M. Yasin Lempo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 424835 Fax 424836

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Acc  
tgl 22-11-2018  
Acc.

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas ekonomi & Bisnis islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin

Di  
Tempat

Punbim bap

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARINA  
NIM : 90300115135  
Fak/ Jurusan : Ekonomi dan bisnis islam / Ilmu Ekonomi  
Semester : Tujuh (VII)

W. Mustafiz Umar. sag. 4/18  
Wardikan Sober. 2/18  
Buatan 5/18

Dengan ini mengajukan judul skripsi sebagai berikut :

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan
2. Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Sidrap
3. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap.

Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan, atas perhatian Bapak saya ucapkan banyak terima kasih.

Samata, 2 November 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Dr. Siradjuddin S.E., M.Si.  
NIP: 19660509 200501 1 003

Yang Bermohon

SARINA  
NIM: 90300115135



UIN ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 9140 Tahun 2018

**TENTANG**

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Mem baca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Sarina**, Nim: 90300115135 tertanggal 05 Desember 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Mustofa Umar, S.Ag.,M.Ag
2. Wardihan Sabar, SE.,M.Si
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Samata-Gowa  
Pada tanggal 6 Desember 2018

Dekan,   
PROF. DR. D. AMBO ASSE, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 755 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Sarina, NIM : 90300115135  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Sarina**, NIM: 90300115135 tertanggal 3 Mei 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017".
- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi;  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas;  
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan ILMU EKONOMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.  
Pembimbing : Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Wardihan Sabar, SE., M.Pd.  
Penguji I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA, Ak.CA.  
Pelaksana : Ismunandar, S.Kom.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 08 Mei 2019  
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 1620 / EB.L/PP.00.9/4/2019  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Seminar Proposal**  
A.n. Sarina/90300115135

Samata, 3 Mei 2019

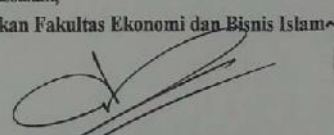
Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019  
Waktu : 10.00 - 12.00 WITA  
Judul Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017  
Tempat : Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Prof. Dr. H. Ambo Assse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Sri Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
 Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 2594 /EB.1/PP.00.9/7/2019  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, 27 Juli 2019

Kepada Yth  
 Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
 Di-  
 Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Sartha  
 NIM : 90300115135  
 Jurusan : ILMU EKONOMI  
 Judul Skripsi : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019  
 Waktu : 13.00 - 14.00 WITA  
 Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
 NIP. 19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1162 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Sarina, NIM: 90300115135  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Sarina, NIM: 90300115135** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Ungkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.  
Pembimbing : Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Wardihan Sabar, SE., M.Pd.  
Penguji I : Dr. Hj. Rahmawati Mula, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA.Ak.CA.  
Pelaksana : Fakhruddin Thamin, SE.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 22 Juli 2019

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 49581022 198703 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I Jl. Sri Alauddin No. 62 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II Jl. H. M. Yasin Lempu No. 36 Siantia Sungguminata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor: 2939 /EB.1/PP.00.9/8/2019

Samata, Agustus 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian  
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Sarina  
NIM : 90300115135  
Jurusan : ILMU EKONOMI  
Judul Skripsi : "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan  
distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi  
Selatan tahun 2008-2017"

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019  
Waktu : 09.00 - 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



H. Ambo Asse, M.Ag.

19581022 198703 1 002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1351 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Sarina  
NIM 90300115135  
Tanggal 1 Agustus 2019  
Mahasiswa Jurusan ILMU EKONOMI  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.  
Penguji I : Dr. Hj. Rahmawati Muhi, S.Ag., M.Ag.  
Penguji II : Dr. Saiful Muehlis, SE., M.SA, Ak.CA.  
Pembimbing I : Mustala Umar, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Wardihan Sabar, SE., M.Pd.  
Pelaksana : Fakhriunnisa Thamin, SE.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 2 Agustus 2019

Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 18659/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor  
 1675/EB.VPP.00.0/6/2019 tanggal 22 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SARINA  
 Nomor Pokok : 90300115135  
 Program Studi : Ilmu Ekonomi  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan  
 judul :  
**" ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
 KABUPATEN KOWA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2017 "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Juli s/d 08 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan  
 ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 03 Juli 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. Perittinggal.

SIMAP PTSP 03-07-2019

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90222



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Makassar, 15 Juli 2019

Nomor : B-211/BPS/7300/225/07/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Bukti Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN Alauddin Makassar  
di-

Makassar

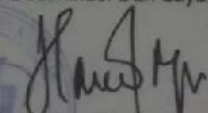
Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sulawesi Selatan Nomor : 18659/S.01/PTSP/2019 Tanggal 03 Juli 2019 perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa peneliti yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : SARINA  
Nomor Pokok : 90300115135  
Program Studi : ILMU EKONOMI  
Pekerjaan : Mahasiswi (SI)

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penelitian dengan judul : **"ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2017"**

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan  
Kasi Desiminasi Dan Layanan Statistik

  
**Mansyur Madiang, SE, M.Si**  
NIP. 196906241989021001

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125, Telepon (0411) – 854838 (Sentral), 872879.Fax. (0411) 851225.  
Email : [sulsel@bps.go.id](mailto:sulsel@bps.go.id) Website : <http://sulsel.bps.go.id>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Sarina, dilahirkan di Sidrap pada tanggal 28 April 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Rasidi dan Hasnawati. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 4 Kulo dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Panca Rijang atau biasa disebut SMP Negeri 1 Kulo dan dinyatakan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Panca Rijang atau yang saat ini dikenal sebagai SMA Negeri 1 Sidrap dan dinyatakan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.